

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM MENANGANI RAZIA
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA**

ARDI CHANDRA / D 101 07 318

ABSTRAK

Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah /Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka penegakan hukum dibidang lalu lintas.

Dalam kasus-kasus tilang proses tilang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan. Namun tidak semua pengendara yang melanggar diberikan surat tilang hanya diberikan teguran. Teguran ini berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan razia menyangkut penerapan hukum, kualitas moral dan etika para aparat penegak hukum, budaya dan sarana dan prasarana jalan belum memadai untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Razia, Penegakan Hukum, Lalu Lintas Angkutan Jalan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.

Untuk memenuhi kebutuhan angkutan publik, dalam norma Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa tanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dapat melibatkan swasta.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasa, pemberdayaan, dan pengawasan. Untuk menangani masalah Kecelakaan Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan

kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Salah satu pengawas dan tindakan hukum tersebut yaitu melakukan razia bagi pengendara bermotor di jalan. Razia ini dilakukan untuk melakukan pengecekan bagi pengendara motor, apakah mereka memiliki surat-surat kendaraan secara lengkap. Bagi mereka yang tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor tersebut akan dikenai tilang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengangkat permasalahan dalam mengawas dan melakukan tindakan hukum bagi pengendara bermotor yaitu TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 DALAM MENANGANI RAZIA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas ?
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkuta Jalan.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas

KUHAP merupakan prosedur untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia khususnya hak untuk diadili menurut proses hukum yang adil. Hal ini perlu dipahami dan ditafsirkan secara konkrit dalam proses peradilan pidana oleh para aparat penegak hukum terutama dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Tetapi dalam batang tubuh KUHAP itu sendiri tidak ada pasal-pasal yang menyinggung tentang proses hukum yang adil, HAM, pembinaan tersangka atau terdakwa maupun terpidana. Untuk itu harus dilihat sikap batin atau jiwa dan KUHAP itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam asas-asas penegakan hukum dalam penjelasan umum KUHAP. Pelaksanaan proses hukum yang adil di Indonesia berarti melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan hukum acara pidana yang dijiwai oleh asas-asas yang melandasinya sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum KUHAP.¹

Selain itu KUHAP merupakan dasar dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus menjadi pedoman bagi penegak hukum

¹Syukri Akub, Cs. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* Mahakarya Rangkang Offset. Jogjakarta.. 2013. Hlm 80

yang menangani tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Dari KUHAP ini pula telah ditetapkan tugas, fungsi dan wewenang dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menangani hal ini mempunyai tugas dan wewenang segala kegiatan berlalu lintas dimasyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa : "Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Tugas POLRI selaku alat penegak hukum diatur dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002, adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No, 2 tahun 2002 antara lain, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Untuk melaksanakan wewenang tersebut di atas, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang dalam pasal 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272.

Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas. Dalam pemeriksaan ini meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil

tindakan apa yang dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan beberapa ketentuan yang menyangkut tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.
5. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Pasal 2

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Selanjutnya Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 3

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. fisik Kendaraan Bermotor;
- d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
- e. izin penyelenggaraan angkutan.

- Pasal 4

(1) Pemeriksaan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. kepemilikan ;
- b. kesesuaian Surat Izin Mengemudi dengan identitas pengemudi;
- c. kesesuaian golongan Surat Izin Mengemudi dengan jenis kendaraan;
- d. masa berlaku; dan
- e. keaslian.

(2) Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. kepemilikan;
- b. kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
- c. masa berlaku; dan
- d. keaslian.

(3) Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan;
- b. masa berlaku; dan
- c. keaslian.

B. Proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Sebagaimana diketahui penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan.

Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan diatas, baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) yang pelaksanaannya meliputi kegiatan simpatik, penindakan pelanggaran dan penyidikan laka lantas.

Direktorat lalu lintas Polda bertugas sebagai Pembina fungsi Satlantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan /Perintah /Jukrah Pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional dibidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dilapangan dalam rangka Penegakan Hukum dibidang lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya prosedur penindakannya terdiri dari:

1. Persiapan

Sebelum melakukan penindakan pelanggaran Lalu-lintas jalan tertentu

dengan menggunakan Blanko Tilang perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :

- a. Blanko Tilang yang telah di cap/stempel kesatuan sesuai dengan kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan
 - b. Ballpoint (warna hitam atau biru)
 - c. Alat pelapis set Blanko Tilang (Hard Board, Karton tebal, Lempengan Seng, dan lain-lain)
 - d. Label barang bukti
 - e. Secara Stasioner (Tempat) menyiapkan papan pemberitahuan razia
 - f. Secara Hunting (Bergerak) Psl 111 KUHP
2. Prosedur-Prosedur razia
- a. Surat perintah Tugas
 - b. Acara pengarahan pimpinan (APP)
 - c. Pembagian tugas :
 - Petugas yang mengurangi kecepatan
 - Petugas yang menghentikan kendaraan
 - Petugas yang melaksanakan pemeriksaan
 - Petugas yang melaksanakan penindakan dengan Tilang
 - Petugas yang mengamankan barang bukti
 - Petugas yang melaksanakan pengamanan lokasi
3. Pelaksanaan razia

Lokasi dilaksanakan dilakukan di jalan umum, dimana di jalan umum yang lurus dan bebas pandangan sehingga tidak mengganggu Kamseltibcar lalu lintas dan ketertiban umum serta tidak dekat dengan rumah ibadah. Dilarang melaksanakan razia ditikungan, tempat terhalang pandangan yang dapat menimbulkan Laka lantas. Dilokasi razia harus dipasang papan petunjuk tentang pelaksanaan razia

Bentuk razia berupa razia gabungan yaitu razia yang dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait (POM TNI, Dishub, Jasa Raharja, Bid Propam, Dit Sabhara dll). Razia mandiri razia yang dilaksanakan secara mandiri oleh personil lalu lintas.

Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka penindakan pelanggaran lalu-lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang yang telah dipersiapkan, maka penindakan dapat dilakukan secara langsung di tempat.

Proses tilang yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk sidang diberikan surat tilang yang dilakukan dengan tindakan penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan.

Namun tidak semua pengendara yang melanggar diberikan surat tilang hanya diberikan teguran. Teguran ini berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran tertulis itu diberikan surat teguran tanpa ada penyitaan barang bukti dan tembuskan kepada orang tua, kepala sekolah/kepala/atasan tempat bekerja.²

C. Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam penegakan hukum peranan yang sangat berpengaruh adalah "*Kualitas moral dan etika aparat penegak hukum*" khususnya Polri dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak pada kinerja yang profesional. Kualitas moral dan etika penegak hukum yang tinggi guna terwujudnya. kinerja penegak hukum yang baik. Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut³ :

1. Penegakan Hukum

- a. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2009 maupun peraturan pemerintah yang ada tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana Pasal 273

²Wawancara Dengan Kasat Lantas Polresta Palu, Tanggal 10 April 2014

³Muhammad Ikhsan, Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya, Mahakarya Office, Yogyakarta, 10 Juli 2009. Hlm. 3-5

- sampai dengan pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang Pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada pasal 78 sampai pasal 79 juncto pasal 87 sampai dengan pasal 89.
- b. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Diljapol) tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.
 - c. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lain lintas tidak dilaksanakan sebagaimana mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asalan.
 - d. Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola Sistem Potensial Point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL).
 - e. Penerapan Perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
 - f. Pemanfaatan teknologi dan laboratorium forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.
2. Sikap Penegak Hukum
 - a. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.
 - b. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
 - c. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS).
 - d. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan/LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan kewenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - e. Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum baik angkutan umum antar propinsi maupun trayek didalam satu propinsi sering menimbulkan terjadinya protes akibat adanya rumpang tindih perijinan trayek serta tidak rasionalnya pemberian trayek pada daerah tertentu dengan dalih otonomi daerah.
 - f. *Traffic Education* belum dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.
 3. Faktor Budaya,

Budaya merupakan suatu sikap dari masyarakat untuk menaati suatu aturan. Masyarakat pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, Jalan dan Lingkungan sangat bergantung dari perilaku Manusia sebagai pengguna jalan menjadi hal yang paling dominan terhadap Kamseltibcar Lantas, hal ini sangat ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di Jalan raya berupa :⁴

 - 1) Mental

Mental dan perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap situasi lalu lintas. Bahkan mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalu lintas, hal ini tidak dapat

⁴*Ibid*

dibentuk secara instan oleh suatu lembaga tertentu, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan dan situasi lalu lintas yang kasat mata secara keseharian selalu terlihat oleh pengguna jalan sehingga membentuk kultur mentalitas berlalu lintas seseorang.

2) Pengetahuan :

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta Kelancaran Lalu lintas, telah dilakukan pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan situasi lalu lintas yang ada dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi di bidang transportasi baik yang berhubungan dengan kendaraan, sarana dan prasarana jalan serta dampak lingkungan lainnya dalam bentuk suatu aturan yang tegas dan jelas serta telah melalui proses sosialisai secara bertahap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam berinteraksi di jalan raya. Setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan atau pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di jalan raya.

3) Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan (Mengendarai/Mengemudi) Kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik

bagi pengemudi / pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Lisensi terhadap kemampuan dalam mengendalikan kendaraan di wujudkan secara formal melalui Surat Izin Mengemudi yang di keluarkan oleh SATPAS Polri sesuai dengan peruntukan kendaraan bermotor yang dikemudikan / dikendarai oleh pengguna jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi Bab VII tentang Pengemudi.

Tetapi dalam praktek keterampilan mengendalikan (Mengendarai / Mengemudi) kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor tidak diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus, melainkan diperoleh dengan tanpa ujian sebagaimana dipersyaratkan.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana ini merupakan faktor yang bersentuhan langsung dengan lalu lintas jalan raya yaitu kendaraan dan jalan. Faktor kendaraan yang sudah tua usianya yang banyak dikendarai di jalan raya, sehingga kualitas kendaraan kurang dapat dijamin.

Begitu pula sarana dan prasarana jalan tidak memadai dengan jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Penambahan sarana dan prasarana jalan yang tidak bertambah akan berpengaruh terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan raya.⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

⁵Tjahyot, *Rancangan Buku Pengantar Analisis Dan Prevensi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Laboratorium Transportasi Departemen Teknik Sipil Depok, , Ft Ui. 2008. Hlm. 11

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan melakukan razia kendaraan di jalan umum di mana dilakukan tilang dengan memberikan surat tilang untuk sidang Pengadilan Negeri yang disertai penyitaan berupa STNK / SIM atau sepeda motor / kendaraan. Selain tindakan tilang tersebut terdapat pula tindakan kepolisian terhadap pengendara yang melanggar dikenai teguran berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain penerapan hukum belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, budaya hukum dari masyarakat yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari mental, pengetahuan dan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor masih kurang. Selain itu sarana dan prasarana jalan belum mendukung untuk memperlancar kelancaran kendaraan bermotor yang tiap tahun bertambah banyak yang tidak diimbangi dengan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang besar untuk menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana jalan agar dapat memperlancar lalu lintas kendaraan yang tiap tahun bertambah banyak.
2. Pemerintah perlu menciptakan suatu sistem transportasi yang terpadu yang dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yaitu menciptakan transportasi massal yang bagus sehingga masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung
Ditlantis Babinkum Polri, *Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan Semester I*, Jakarta.
Tahun 2006.
- Syukri Akub Cs., *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. 2013.
- Tjahyono T, *Rancangan Buku Pengantar Analisis dan Prevensi kecelakaan Lalu Lintas
Jalan*, Depok, *Laboratorium Transportasi Departemen Teknik Sipil*, FT UI. 2008.
- Muhammad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*, Yogyakarta, 10
Juli 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
KUHP (Kitap Undang-undang Pidana)

C. Website

- http://pn-sumbawabesar.net/prosedur-berperkara/prosedur-pidana/113-prosedur_sidang-tilang.

ARDI CHANDRA, Lahir di Palu, 07 Juni 1989, Alamat Rumah Jalan Touwa II Nomor 37 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email ardi_chandra89@yahoo.co.id

